

ABSTRAK

Tesis ini adalah hasil penelitian mengenai Kebijakan Hukum Pidana terhadap penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan mengambil tempat penelitian pada wilayah kerja Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang. Tesis ini bertujuan menjawab permasalahan mengenai: (1) Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penyelundupan dan Impelementasinya Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan Wilayah Kerja Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang dan (2) Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penyelundupan yang akan datang. Fokus penelitian adalah membuktikan unsur pertanggungjawaban pidana dalam pasal tindak pidana undang-undang kepabeanan, apakah telah mengakomodir asas kesalahan sebagai asas yang fundamental dalam pasal-pasal tindak pidana.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang menjabarkan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan dan implementasinya pada wilayah kerja Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang, serta mendeskripsikan kedudukan asas kesalahan dalam rumusan pasal tindak pidana undang-undang kepabeanan. Objek utama penelitian adalah bahan primer yang diperoleh dengan cara langsung mengambil data dari lapangan penelitian yaitu di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang dan bahan sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Undang-undang kepabeanan tidak memuat konsep asas kesalahan secara komprehensif. Hal tersebut berimplikasi terhadap penafsiran dan ketika undang-undang kepabeanan saat ini diaplikasikan. Aparat PPNS Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Tanjung Emas khususnya, harus membuktikan konsep kesalahan yang berlaku umum. 2) Kebijakan hukum pidana khususnya pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana yang akan datang menerapkan asas kesalahan sebagaimana dimaksud RUU KUHP tahun 2012 Pasal 37 ayat (1), selain itu juga asas *strict liability* sebagaimana dimaksud RUU KUHP tahun 2012 Pasal 38 ayat (1). Didalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan, asas *strict liability* tidak tepat untuk diimplementasikan karena fakta dilapangan membuktikan bahwa PPNS Bea dan Cukai tetap harus membuktikan asas kesalahan atau unsur kesengajaan dalam proses penyidikannya. Tindak pidana penyelundupan didalam RUU KUHP tahun 2012 hanya

memasukkan tindak pidana penyelundupan manusia sebagaimana dimaksud Pasal 578 ayat (1) dan ayat (2), sedangkan tindak pidana penyelundupan barang belum terakomodir. Karena itu direkomendasikan kepada pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan dan memberlakukan RUU KUHP menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Undang-undang Kepabeanan, Asas Kesalahan, Unsur Kesengajaan.

ABSTRACT

This thesis is the result of research on Penal Policy against Crime prevention Smuggling Under the Customs Law and the research taking place in the working area of KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang. This thesis aims to answer the problems concerning: (1) How Policy Criminal Law against the Crime of Trafficking and its implementation by the Law Office of the KPPBC Tipe Madya Tanjung Emas Semarang and (2) How Should Penal Policy against the Smuggling Crime in the future. The focus of the study is to prove the element of criminal responsibility in article criminal offense of customs legislation, whether it has to accommodate principle of error as a fundamental principle in the articles of the criminal act.

This study uses normative juridical approach, which outlines the Penal policy in prevention the crime of smuggling and its implementation in the working area of the Office of KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang, and to describe the position of the principle of error in the formulation of article criminal offense customs laws , The main object of the research is the primary material obtained by directly retrieving data from a field of research that is in the Office of KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang and secondary materials that explain the primary ingredient.

The results of research showed that: 1) The Customs Law does not contain a comprehensive concept of the principle of fault. It has implications for the interpretation of the Customs Law when current is applied. Officers of Investigations Customs and Excise of KPPBC Tipe Madya Tanjung Emas, should prove the generally accepted concept of errors. 2) The policy on criminal law, especially criminal liability in criminal law which will come to apply the principle of error referred Draft Criminal Code of 2012 Article 37 paragraph (1), it is also the principle of strict liability bill referred to the Criminal Code of 2012 Article 38 paragraph (1). In the response to the crime of smuggling, the principle of strict liability was not appropriate to be implemented due to the fact the field proves that the Customs and Excise investigators still had to prove the principle of fault or intentional element in the process of investigation. Smuggling a criminal offense in the Criminal Code draft in 2012 only incorporate the crime of human trafficking, as referred to in Article 578 paragraph (1) and (2), whereas the crime of smuggling of goods has not been accommodated. It is therefore recommended to the government and parliament to immediately ratify and enforce the Criminal Code draft into the draft new Criminal Code.

Key Words: penal policy, customs law, principle of error, the element of intent.